SUPLEMEN BARU campesinos
# PEMBARUAN TANI
www.spi.or.id
Edisi 76
Juni 2010
Harga Rp. 2000
MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

INDEKS BERITA

**6**
La Via Campesina berpartisipasi dalam pertemuan PBB pasca Cochamba

**11**
Sukardi Bendang: "Bacalah, dan kita akan cerdas"

**14**
*Food estate* untuk siapa?

***" Memang harus ada yang membela para petani kecil, dan SPI telah terbukti mampu mengemban amanah itu "***

Rujianto
Majelis Nasional Petani, Serikat Petani Indonesia

# Henry Saragih dan Evo Morales membangun gerakan rakyat untuk perubahan iklim

COCHABAMBA. Henry Saragih dan Presiden Bolivia, Evo Morales membangun kesepakan untuk meneruskan perjuangan perubahan iklim di luar UNFCCC/COP dalam pertemuan *People's World Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth* di Cochabamba – Bolivia, pada 19-22 April 2010.

Menurut Henry, sebagai pimpinan gerakan petani internasional (La Via Campesina) dia akan bersama pimpinan dunia seperti Evo Morales untuk memainkan peran aktif dalam memobilisasi gerakan rakyat untuk menghentikan solusi palsu yang ditawarkan negara-negara kapitalis dalam mengatasi perubahan iklim, se perti proyek *agrofuel*, GMO dan REDD yang banyak merugikan petani.

Lebih lanjut Henry mengatakan agenda gerakan petani untuk mengatasi perubahan iklim adalah mendukung pertanian berkelanjutan, mengurangi penggunaan agrokimia, membangun sistem pertanian lokal, melindungi *biodiversity*, desentralisasi produksi energi, stop perkebunan monokultur, reforma agraria, stop model peternakan industrial, mendukung produksi pangan lokal tanpa olahan, dan stop deforestasi.

"Kita ingin membangun tatanan ekonomi, politik dan budaya yang berbasiskan pada prinsip kehidupan bersama dan kelangsungan planet bumi atau *Mother Earth*", ungkap Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) itu.

"Kami akan memberikan bendera kami dari La Via Campesina dan CLOC – simbol kami yang paling kuat – karena Presiden Morales adalah salah satu dari para pendiri kedua organisasi petani yang cukup berpengaruh di Amerika Latin dan Dunia, dan karena tidak ada orang lain yang memiliki kredibilitas itu untuk mengadakan konferensi ini" tambah Henry.#

Henry Saragih (kiri) bersama Presiden Bolivia, Evo Morales dalam pertemuan *People's World Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth* di Cochabamba – Bolivia, pada 19-22 April 2010.

# Dapur Tani

Saya merasakan perubahan begitu cepat. Saya merenungkan apa yang telah, sedang dan akan berubah. Sewaktu masih di bangku kuliah di pertengahan tahun 1980-an, saya mendengar cerita ada orang yang sarapan pagi di Medan, makan siang di Jakarta, dan tidur di Bangkok. Kini kehidupan itu saya rasakan, pagi hari saya masih di tengah tanah perjuangan Sei Rengas, Sumatera Selatan, malam hari di Jakarta, besoknya telah di Dubai dan petangnya di Brasil. Dalam sehari banyak hal yang bisa dilakukan dan terjadi. Saya membayangkan jika sebagai ketua umum SPI dan La Via Campesina saya bisa melakukan banyak hal dalam sehari, maka demikian juga halnya dengan pemilik modal yang mengendalikan berbagai jenis usahanya di berbagai belahan dunia. Hanya dengan mengandalkan sebuah *smart mobil phone* ditambah dengan sebuah laptop, dia bisa memonitor dan mengendalikan seluruh perusahaannya di seluruh dunia.

Saya merasakan betapa zaman sekarang semakin hari semakin berhubungan satu sama lain, dari yang sebelumnya tidak ada hubungan sama sekali. Ketika ayam gulai sarapan pagi yang dihidangkan oleh ibu tani SPI Rengas itu, saya membayangkan bahwa pemilik ayam tersebut sedang melihat perkembangan usahanya di bursa saham Bangkok. Ketika sedang minum. saya membayangkan betapa setiap teguk air, sekian Rupiah sudah harus mengalir ke Bank Swiss atau Singapura. Saya juga membayangkan kemana akhirnya nanti semua plastik tempat air minum itu. Perubahan itu begitu cepat, pertanyaannya apakah dalam perubahan yang begitu cepat itu, kita kaum tani bisa mengerti apa sesungguhnya yang sedang berubah? Siapa yang sesungguhnya yang menjadi aktor dalam perubahan itu? dan bagaimana posisi kita sebagai kaum tani? Ketika renungan itu semakin jauh, jantung ini terasa menurun denyutnya. Suatu saat ketika berada di sebuah pesawat terbang, saya melihat hampir dua pertiga isi penumpang yang mengantarkan untuk melihat kaum tani di selatan Amerika, mereka adalah remaja-remaja petani, ibu-ibu petani. Demi pekerjaan dan melangsungkan kehidupannya mereka harus terpaksa meninggalkan suami, anak, orang tua, dan sanak keluarganya menjadi buruh dan pembantu di keluarga-keluarga di berbagai negara di Timur Tengah.

Begitu banyak perubahan, sekarang pertanyaannya bagaimana di tengah perubahan yang begitu cepat tersebut, kita kaum tani bisa mengerti tentang perubahan yang terjadi, dan bagaimana kita bisa memahami perabahan itu dan bisa berjuang untuk merubahnya. Semoga kolom yang hadir ini bisa menjadi pembuka untuk memahami perubahan yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan.

*-Henry Saragih -*

KONFLIK AGRARIA

## PTPN II intimidasi SPI Basis Sei Litur

LANGKAT. Belum genap satu bulan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) Basis Sei Litur, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menduduki kembali lahan mereka yang selama ini dikuasai oleh PTPN II Kebun Sawit Sebrang. Teror dan intimidasi kembali mewarnai hari-hari mereka, baik pada saat melakukan aktivitas pertanian di lahan maupun dalam kehidupan sosial mereka.

Pada Selasa dan Rabu (20-21/04), Pihak PTPN II membawa massa sebanyak tiga truk yang terdiri dari buruh harian lepas PTPN II Kebun Sawit Sebrang ke lahan perjuangan milik petani anggota SPI Basis Sei Litur. Dengan mendapat pengawalan sekitar 20 orang polisi dari Polsek Sawit Sebrang, rombongan dari PTPN II Kebun Sawit Sebrang ini hendak mendirikan plang yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan HGU milik PTPN II Kebun Sawit Sebrang. Akibatnya terjadi adu mulut yang cukup hebat antara petani anggota SPI Basis Sei Litur dengan pihak perusahaan.

Saenan, Ketua SPI Basis Sei Litur mengungkapkan bahwa tanah itu memang milik mereka. "Kami punya bukti-buktinya kok, kami juga menyayangkan tindakan PTPN II yang sengaja mengadu domba masyarakat, antara kami (petani SPI Basis Sei Litur-red) dengan buruh lepasnya" tegas Saenan.

Wagimin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SPI Sumatera Utara menyayangkan pihak perkebunan dalam kasus ini PTPN II, yang tetap bersikap arogan dalam menanggapi permasalahan yang melibatkan masyarakat petani kecil. Dia juga menyayangkan pihak kepolisian sebagai aparatur negara tidak mengambil peran aktif dalam menjaga situasi kondusif di lokasi sengketa maupun lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Wagimin juga mendesak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumatera Utara untuk memberi kejelasan perihal status yang selama ini dikuasai oleh PTPN tanpa HGU. " Kami juga mendesak BPN Kanwil Sumut agar tidak menerbitkan Sertifikat HGU berdasarkan SK kepala BPN RI no. 119/HGU/BPN RI/2009, karena terdapat silang sengketa diatas areal lahan yang dimaksud tersebut" tambah Wagimin.

Sejak 1953, lahan tersebut dikuasai dan diolah oleh masyarakat sebagai sumber mata pencarian mereka. Pada 1963, lahan tersebut diambil paksa oleh perusahaan perkebunan bernama Boenes Area yang dipimpin oleh Tuan Besar Chris Wehh. Namun karena kegigihan masyarakat untuk mempertahankan lahan mereka akhirnya lahan tersebut dapat dikuasai kembali oleh masyarakat. Ketenangan masyarakat dalam mengolah lahan tersebut tidak berlangsung lama, tahun 1975 – 1976, Kepala Desa Sei Litur Tasik yang saat itu dipegang oleh Alm. Kasbun meminta paksa surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat dengan alasan akan diperbaharui dan bagi yang tidak mau menyerahkan dianggap sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Tanpa sepengetahuan masyarakat, pada tahun 1977 – 1978 lahan masyarakat telah beralih kepada PTP II. Dengan kekuatan militer, PTP II mengklaim tanah tersebut merupakan tanah milik perusahaan.#

PEMBARUAN TANI

**Penanggung Jawab**: Henry Saragih **Pemimpin Umum:** Zaenal Arifin Fuad **Pemimpin Redaksi:** Tita Riana Zen **Redaktur Pelaksana & Sekretaris Redaksi:** Hadiedi Prasaja **Redaksi:** Achmad Ya'kub, Ali Fahmi, Agus Rully, Cecep Risnandar, Tejo Pramono, Muhammad Ikhwan, Wilda Tarigan, Syahroni **Reporter:** Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana, Yudha Fathoni, Wahyu Agung Perdana, Tri Esti Ningrum, Megawati, Andriana **Keuangan:** Sri Wahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan **Penerbit:** Serikat Petani Indonesia (SPI) **Alamat Redaksi:** Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790 **Telp:** +62 21 7993426 **Email:** pembaruantani@spi.or.id **Website:** www.spi.or.id

KEBIJAKAN AGRARIA

## SPI Sumatera Barat lakukan aksi tolak *food estate*

Massa SPI Sumatera Barat menggelar aksi menolak penerapan *food estate* di Indonesia

PADANG. Ratusan massa Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) melakukan aksi menolak *food estate* di depan kantor DPRD Sumatera Barat (03/05). Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumbar mengatakan bahwa aksi ini dalam rangka menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang lahan telantar dan PP No 18/2010 tentang usaha budidaya tanaman yang merupakan turunan dari kebijakan *food estate.*

"Menurut kami PP No. 11 Tahun 2010 tentang Tanah Terlantar dan PP No. 18 Tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman ini justru merupakan feodalisme terhadap petani, menjadikan petani buruh bagi pemodal dan akan menimbulkan konflik pertanahan baru" ungkap Sukardi.

Sukardi menambahkan bahwa langkah nyata untuk menanggulangi masalah petani di negeri ini adalah dengan kembali kepada UUPA No. 5/1960. Saat ini di Indonesia masih terdapat 12.418.0563 hektar tanah terlantar (BPN;2008), tanah tersebut akan sangat bermanfaat jika didistribusikan untuk keluarga-keluarga tani. Pendistribusian ini hendaknya mengutamakan keluarga tani yang tak bertanah, buruh tani, dan petani kecil dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 hektar serta menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terjadi di Sumatera Barat dan di seluruh Indonesia.

"Jadi yang harus dibagi itu tanah, bukan malah bagi-bagi sertifikat lahan yang selama ini dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional" kata Sukardi.

Sementara itu, perwakilan aksi diterima oleh komisi I DPRD Sumbar yang membidangi bagian hukum,politik, keamanan dan kebijakan. Setelah melalui diskusi akhirnya diambil kesepakatan bahwa instansi yang terkait (dalam hal ini BPN, Dinas Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan) akan melakukan rapat bersama dengan SPI Sumatera Barat mengenai dampak kebijakan food estate di Sumbar.

Selain itu pihak DPRD dan Dinas yang terkait yang terkait juga akan melakukan investigasi langsung ke lahan-lahan petani anggota SPI Sumbar yang terlibat konflik.

"Kami juga mendesak agar segera dibentuk tim identifikasi pendataan lahan yang anggotanya terdiri dari organisasi petani dan pemerintah untuk mendata objek land reform yang akan distribusikan kepada rakyat tak bertanah dan petani gurem serta memberikan kepastian bagi masyarakat adat" tambah Sukardi.#

ORGANISASI

## BPW SPI Sumut menggelar rapat kerja wilayah

MEDAN. Memasuki tahun ke-3 kepengurusan, Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat kerja wilayah guna merumuskan draft program kerja tahun ke-3 di sekretariat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumut (01/05).

Rapat kerja wilayah ini dihadiri oleh para pengurus cabang, perwakilan dari kabupaten yang belum terbentuk cabang serta para koordinator sekretariat operasional. Wagimin, Ketua BPW SPI Sumut pada saat sambutannya mengatakan bahwa rapat kerja wilayah ini bermaksud untuk memberikan informasi mengenai perjalanan organisasi salama satu tahun belakangan. "Tidak hanya mengenai informasi perkembangan SPI Wilayah Sumut tetapi juga informasi mengenai perkembangan cabang-cabang maupun kabupaten lain yang belum terbentuk cabang" ungkapnya.

Dalam perumusan program kerja selama satu tahun ke depan, BPW SPI Sumut banyak mendapatkan masukan dari para peserta rapat mengingat para peserta rapat merupakan utusan dari kabupaten sebaran anggota SPI Sumut sehingga mereka yang lebih mengetahui kebutuhan petani sesungguhnya.

Rapat kerja wilayah yang mengangkat tema "Kesatuan Kaum Tani dan Persatuan Nasional untuk Mewujudkan Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Rakyat Menuju Keadilan Sosial" ini menghasilkan draft program kerja BPW SPI Sumut tahun ke-3 yang akan disahkan pada rapat pleno mendatang.#

**TOLAK FOOD ESTATE ! ! !**

*Food estate* jadikan petani
sebagai buruh di negerinya sendiri

www.spi.or.id

KEBIJAKAN AGRARIA

# SPI Sumbar bantah produksi padi meningkat

PADANG. Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat (Sumbar) meragukan data-data yang diungkapkan Gubernur Sumatera Barat tentang produksi padi dalam laporan keterangan pertangungjawaban (LKPj) tahun 2009 dan LKPj akhir masa jabatan gubernur (15/05). Menurut catatan SPI Sumbar, di Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 1.293 hektar lahan berkurang dalam lima tahun terakhir, yang tersisa hanya 30.466 hektar dengan kepemilikan lahan 0,36 hektar per rumah tangga petani.

Bantahan ini berdasarkan laporan keterangan pertangungjawaban (LKP) tahun 2009 dan LKPj akhir masa jabatan gubernur, penguatan perekonomian daerah secara langsung dipengaruhi kondisi ketersediaan pangan terutama tingkat kecukupan beras. Sektor pertanian masih menjadi primadona (ungulan) perekonomian sumbar. Ini dapat dilihat, selama empat tahun terakhir, tingkat kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) berada diatas 20 persen. Presentase tingkat kontribusi sektor pertanian tahun 2009 sebesar 23,75 persen. Meski sedikit menurun dari tahun 2008 yang mencapai 24,05 persen, namun masih berada di urutan teratas setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 17,99 persen.

Marlis Rahman, Gubernur Sumbar mengatakan bahwa produksi padi sejak 2005 hingga 2009 cenderung meningkat, kecuali tahun 2006. Tingkat produksi padi pada 2005 sebesar 1.907.390 ton, dengan kebutuhan 570.792ton sehingga terjadi kelebihan dan surplus yang cukup besar. Begitu juga di tahun 2007, tingkat produksi padi meningkat jadi 1.938.120 ton, dengan kebutuhan sebesar 578.877 ton. Marlis menambahkan bahwa untuk tahun 2009, tingkat produksi padi mencapai 2.105.780 ton, serta ketersediaan beras 1.172.780ton, padahal kebutuhan beras hanya 594.239 ton, sehinga terjadi surplus beras sebesar 578.361 ton.

Sukardi Bendang, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI sumbar kembali membantah data-data yang disebutkan oleh Gubernur tersebut. Sukardi mencontohkannya dengan alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten pasaman barat. Sebelum tahun 1990 daerah tersebut termasuk sentra produksi beras dengan luas sawah tidak kurang dari 27.168 hektar, namun sesudah masuk perkebunan sawit sejak tahun 1981 terjadi penurunan luas sawah. Tahun 2005 luas sawah di pasaman barat tercatat 16.127 hektar. Dalam periode tahun 2005 sampai 2007 terjadi penurunan kumulatif seluas 1.287 hektar. Jadi sawah yang tersisa hanya pada tahun 2007 hanya seluas 14.840 hektar dan 4.953 hektar di antaranya ditanami tanaman jagung.

"Selain itu, di Kabupaten Lima Puluh Kota juga terjadi penurunan produksi dan luas produksi. Pada data yang terdapat dalam Lima Puluh Kota dalam angka dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, produksi padi (GKB) tahun 2008 adalah sebesar 208.531 ton dengan luas panen 43.451 hektar. Jika dibanding produksi tahun 2008 dengan tahun 2007 sebesar 218.542 ton dengan luas panen 46.140 hektar terjadi penurunan produksi sebesar 7,33 persen dan penurunan luas hingga 5,80 persen" ungkap Sukardi.

Sukardi menambahkan bahwa produksi di Limapuluh Kota pada tahun 2008 jauh menurun dibanding tahun 2006 dengan jumlah produksi sebesar 202.971 ton dengan luas panen 43.200 hektar. Dari data ini jelas terjadi penurunan luas panen tahun 2008 dibanding tahun 2007 sebesar 2.669 hektar, sementara pencetakan sawah baru di Limapuluh Kota tidak signifikan, bahkan alih fungsi lahan menjadi semakin pesat akibat laju pembangunan.

"Dari data di atas terjadi penyempitan luas lahan sehingga sangat mustahil produksi padi Sumbar dapat melebihi target. Apalagi selama tahun 2009 para petani dipersulit dengan kelangkaan dan mahalnya pupuk, pengairan dan persoalan lainnya. Ditambah lagi akhir tahun 2009 produksi padi Sumbar juga sedikit terganggu di beberapa kabupaten akibat gempa" tambah Sukardi.#

PETANI PEREMPUAN

# BPP SPI bentuk PKPP

JAKARTA. Badan Pelaksana Pusat (BPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) melalui Departemen Petani Perempuan akan membentuk Panitia Kerja Petani Perempuan (PKPP) SPI. Hal ini seperti disebutkan oleh Wilda Tarigan selaku Ketua Departemen Petani Perempuan SPI di kantor pusat DPP SPI, tadi pagi (30/04). Wilda mengatakan bahwa melalui Panitia Kerja Petani Perempuan ini, diharapkan kerja konsolidasi dan koordinasi petani perempuan di tiap wilayah akan semakin efektif sehingga akan tercapai peningkatan petani perempuan di SPI baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Wilda mengungkapkan bahwa hal ini juga sehubungan dengan kondisi dan perkembangan petani perempuan saat ini, dalam hal meningkatkan keterlibatan aktif petani perempuan dalam organisasi perjuangan SPI, seperti yang termaktub dalam amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO). "Dibutuhkan kerja-kerja efektif yang khusus dilakukan untuk mempercepat dan mendorong lebih banyak lagi petani perempuan terlibat dalam perjuangan petani ini" ungkap Wilda.

PKPP ini nantinya akan bertugas dalam banyak hal seperti melakukan kerja konsolidasi organisasi yang meliputi perekrutan anggota petani perempuan, mengadakan rapat atau pertemuan-pertemuan, pendidikan dan aktivitas petani perempuan lainnya berdasarkan rumusan kerja nasional. Selain itu PKPP juga diharapkan mampu melakukan pendataan anggota petani perempuan dan mendokumentasikan atau mengumpulkan problema dan kebutuhan nyata yang dialami oleh petani perempuan baik itu bidangekonomi, politik, sosial dan budaya.

"Kami juga berharap agar PKPP ini mampu melakukan kontrol dan menjamin terintegrasikannya nilai-nilai keadilan gender dalam kegiatan organisasi" tambah Wilda.#

UUPA No. 5 TAHUN 1960
UNTUK REFORMA AGRARIA
SEJATI !!!
www.spi.or.id

LEMBARAN KHUSUS
# campesinos
KABAR INTERNASIONAL

PEMBARUAN TANI | **CAMPESINOS** | EDISI 76 | **JUNI 2010**

**KEBIJAKAN AGRARIA**

## Aksi Petani Eropa dan Amerika Latin menolak perdagangan bebas

Para peserta aksi La Via Campesina di Madrid, Spanyol yang menolak perjanjian perdagangan bebas antar negara, baik yang tergabung dalam Uni Eropa ataupun tidak.

MADRID. Ratusan petani La Via Campesina (Organisasi Petani Internasional) dari Eropa dan Amerika Latin bergabung dalam aksi demonstrasi menolak perjanjian perdagangan bebas antara negara, baik yang tergabung dalam Uni Eropa ataupun kawasan lain (17/05). Para peserta aksi ini menuntut agar lebih dari 60 kepala negara dari Eropa dan Amerika Latin meninggalkan negosiasi dan sama sekali tidak menandatangani perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Koordinator umum La Via Campesina, Henry Saragih mengatakan bahwa penerima perjanjian tersebut hanyalah perusahaan-perusahaan transnasional yang sama dan investor keuangan internasional yang hanya menyebabkan krisis ekonomi, sosial, lingkungan dan politik saat ini.

" Ideologi pertumbuhan tak terbatas berdasarkan kondisi perdagangan neoliberal yang dikelola oleh dana spekulatif internasional dan sistem perbankan sudah mati. Jadi perjanjian perdagangan bebas tersebut tidaklah berdasarkan kepentingan rakyat Eropa atau Amerika Latin untuk menandatangani perjanjian yang dikenakan oleh komisi Eropa tersebut" ungkap Henry yang juga Ketua Umum Serikat Petani Indonesia ini.

Para Petani yang berasal dari CLOC (*Coordinacion Latinoamericano Organizaciones de los del Campo*-La Via Campesina Amerika Latin) dan ECVC (European Coordination Via Campesina-La Via Campesina Eropa) ini bersatu untuk tetap memperjuangkan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga milik mereka, dan tetap menjaga solidaritas dan kesatuan.

Dalam aksinya, mereka juga bersikeras bahwa petani seperti merekalah yang sebenarnya memiliki peran untuk menghasilkan pangan bagi masyarakat dunia, dan tidak membiarkan para perantara seperti perusahaan ekspor pangan multinasional dan industri pengolahan makanan yang menentukan kebijakan pangan, pertanian, dan perdagangan di negara mereka masing-masing.#

**GLOBALIZE HOPE**
**GLOBALIZE STRUGGLE!!!**

www.viacampesina.org

KEBIJAKAN AGRARIA

# La Via Campesina berpartisipasi dalam pertemuan PBB pasca Cochabamba

Para Delegasi La Via Campesina bersama Presiden Bolivia, Evo Morales sedang membicarakan mengenai hasil persetujuan Cochabamba tentang perubahan iklim kepada Sekretaris Jenderal PBB-Ban Ki Moon. Kredit Foto: UN Photo/Mark Garten

NEWYORK. Pada 6-7 Mei yang lalu, La Via Campesina berpartisipasi dalam sebuah delegasi kelompok masyarakat sipil yang diselenggarakan oleh pemerintah Bolivia. Delegasi ini bersama Presiden Bolivia, Evo Morales menyajikan Persetujuan Takyat Cochabamba ke Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, G77 dan China.

Acara ini merupakan kesempatan bersejarah bagi anggota masyarakat sipil untuk mendapatkan ruang politik dalam dialog PBB tentang perubahan iklim menjelang perundingan resmi berikutnya di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Cancun, Meksiko pada bulan Desember.

"Sebagai utusan La Via Campesina, saya bisa berkata kepada rekan-rekan gerakan sosial saya di Brasil. Kami berterima kasih kepada intuisi dan tindakan Evo Morales yang membuka jalan baru untuk meningkatkan tuntutan-tuntutan gerakan sosial untuk PBB melalui Sekretaris Jenderalnya, dan mungkin di Cancun pada perundingan resmi iklim internasional berikutnya, "kata Pastur Tomás Balduíno dari Komisi Pastoral Tanah di Brazil, salah satu dari dua wakil La Via Campesina.

Persetujuan Rakyat Cochabamba adalah produk dari upaya kolaboratif dari lebih 35.000 peserta Konferensi Rakyat Dunia tentang Perubahan Iklim dan Hak Ibu Bumi, yang diselenggarakan pada 20-22 April di Bolivia. La Via Campesina mengirimkan 300 tamu internasional dan 3000 delegasinya pada konferensi tersebut. Presiden Morales langsung yang mengundang La Via Campesina setelah perundingan UNFCCC di Kopenhagen bulan Desember 2009 lalu.

Persetujuan Rakyat Cochabamba adalah alternatif dari Persetujuan Kopenhagen yang cenderung muncul sebagai akibat dari tekanan politik oleh Amerika Serikat. Persetujuan Kopenhagen kini telah ditandatangani oleh 120 dari 192 negara anggota PBB.

Menurut Pablo Solon, Duta Besar Bolivia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, persetujuan tersebut berusaha untuk merusak Protokol Kyoto. Persetujuan itu juga tidak memiliki perbedaan perlakuan di antara negara-negara kaya dan miskin, serta cenderung ingin menguurangi bantuan untuk negara-negara miskin dalam mengatasi dampak perubahan iklim dengan spesifikasi tanpa sumber pendanaan. Selain itu, persetujuan Kopenhagen akan membuat komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan

*Bersambung ke hal. 7*

Sambungan dari hal. 6 ***La Via Campesina...***

tidak lagi sukarela.

Hal lain yang juga utama adalah bahwa persetujuan Kopenhagen tidak menggarisbawahi bagaimana emisi dari industri pertanian yang menyebabkan sekitar sepertiga dari emisi global akan dikurangi.

"Pertanian tidak dibahas dalam negosiasi UNFCCC sebagaimana mestinya, sementara pada Konferensi Rakyat hal itu banyak dibicarakan sebagai bagian besar dari emisi gas rumah kaca yang berasal dari pertanian. Pembangunan pertanian tidak harus didasarkan pada pengembangan bisnis dan keuntungan, tapi lebih pada pertanian berkelanjutan yang selaras dengan alam. Kedaulatan pangan harus ditegakkan" ungkap Pablo Solon.

Faktanya, Undang-Undang UNFCCC tentang pertanian yang ada saat ini ataupun di masa depan mungkin akan memfasilitasi perluasan industri pertanian, sehingga meningkatkan integrasi vertikal dan konsolidasi pasar agribisnis, khususnya bioteknologi dan perusahaan-perusahaan kimia AS, seperti Monsanto, DuPont, dan Arborgen.

Sebagai contoh, Sekretariat UNFCCC sedang mempertimbangkan apakah perkebunan monokultur pohon kayu putih dan hutan pinus – yang telah mengalami modifikasi genetik – akan dihitung sebagai hutan untuk offset karbon dan emisi di bawah program REDD.

Monsanto saat ini sedang melobi untuk memiliki perkebunan kedelai GMO (Genetically Modified Organism-organisme hasil rekayasa genetika) monokultur Roundup Ready yang memenuhi persyaratan untuk kredit karbon. Monsanto berharap bahwa nantinya strateginya ini akan meningkatkan penggunaan herbisida glifosat – dijual oleh Monsanto sebagai Roundup – yang berada dalam kelas bahan kimia yang sangat beracun yang disebut disruptors endokrin.

Dalam penjelasannya kepada G77 dan Cina, Presiden Morales berkata bahwa ada dua cara untuk maju yaitu dengan menyelematkan kapitalisme, atau menyelematkan ibu Bumi.

"Jika Cancun sama saja dengan Kopenhagen, maka sayangnya PBB akan kehilangan otoritasnya di terhadap setiap orang di dunia ini. " sebut Evo Morales.

Pertemuan di Bolivia yang lalu merupakan momen untuk memimpin babak baru dari Protokol Kyoto yang mencakup mandat hukum untuk pengurangan emisi pada sumbernya, dan bukan untuk perdagangan karbon kredit dan keuangan. Persetujuan Rakyat Cochabamba menuntut 300 milyar dolar Amerika per tahun untuk pembiayaan pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim, pengurangan emisi sebesar 50% oleh negara-negara kaya pada tahun 2020, serta pengadilan internasional keadilan iklim.

Pada sebuah konferensi pers, Morales ditanyai tentang keputusan administrasi Obama untuk menolak bantuan iklim untuk negara yang menolak menandatangani persetujuan Kopenhagen. Bulan lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) membatalkan bantuan iklim sebesar 3 juta dollar AS untuk Bolivia dan 2,5 juta dolar AS untuk Ekuador. Padahal dana tersebut berasal dari Millenium Challenge Corporation, sebuah perusahaan swasta publik yang diciptakan oleh pemerintahan Bush. "Ini namanya pemerasan" tegas Evo Morales.

Yoon Guem Soon, seorang petani Korea Selatan dan anggota Komite Koordinator Internasional La Via Campesina berpendapat bahwa pemerintahan Bolivia dan Presidennya Evo Morales menunjukkan kepada gerakan-gerakan sosial tentang langkah berikutnya setelah Cochabamba.

"Melalui Cochabamba dan pertemuan di New York ini, saya cukup kalau yakin kita dapat meraih kemenangan di Cancun. Sementara itu, kita, La Via Campesina punya banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan " ungkap nyonya Yoon.#

**ANALISIS**

## Kapitalisme menebar dusta dalam industri pangan

Isabelle Delforge (tengah) bersama Henry Saragih (kiri) dalam aksi global menolak UNFCCC di Kopenhagen tahun lalu

JAKARTA. Kapitalisme sedang menebar dusta dalam industri pangan. Hal ini disampaikan oleh Isabelle Delforge, staf *Internatioanl Operational Secretariat* (IOS) La Via Campesina. Isabelle menjelaskan bahwa sudah sejak lama kapitalisme berkoar mengatakan kekurangan pangan disebabkan oleh kurangnya produksi pangan, sehingga pangan harus diserahkan pada perusahaan-perusahaan pengelola industri pangan. Namun faktanya, jumlah produksi pangan dunia saat ini justru melimpah dibandingkan dengan jumlah populasi dunia.

"Permasalahannya adalah bukan dengan membangun industri pangan atau *food estate*, melainkan bagaimana membangun kedaulatan pangan dan mengoptimalkan distribusi", tegasnya.

Lebih lanjut Isabelle yang juga penulis buku Dusta Industri Pangan ini menjelaskan apabila pangan diproduksi dalam model kapitalisme maka yang akan terjadi adalah monopoli ekonomi oleh satu pihak yang lebih kuat mengalahkan pihak yang lebih lemah seperti petani kecil. harusnya negara bertanggungjawab mengatasi monopoli yang terjadi, tetapi biasanya para kapitalis memiliki kemampuan yang besar untuk melobi pemerintah, sehingga negara lebih berpihak pada mereka dibandingkan dengan petani kecil

Dalam bukunya Isabelle mengungkapkan monopoli perusahaan agribisnis raksasa Monsanto terhadap benih rekayasa genetik. Pada tahun 2002 Monsanto menuntut petani kecil Canada atas tuduhan menanam jagung transgenik milik Monsanto secara illegal.

Padahal, sebenarnya benang sari jagung transgenik Monsanto hanya terbang terbawa angin sehingga tertanam tanpa sengaja di lahan si petani. Kasus ini dibawa ke pengadilan dan petani dihukum denda paten sebesar 25.000 dolar Canada.

"Saya berharap kejadian ini tidak terjadi di Indonesia", kata Isabelle. #

■ ■ ■

KEBIJAKAN AGRARIA

# Perdagangan bebas matikan petani susu Eropa dan Amerika Latin

La Via Campesina Internasional bersama dengan perwakilan dari Eropa dan Amerika Latin mengadakan pertemuan di Madrid untuk menegaskan penentangan terhadap perjanjian perdagangan bebas (14-18/05). La Via Capesinan menganggap bahwa perjanjian perdagangan ini mengancam produsen kecil dan menengah dari kedua benua.

Selain itu Uni Eropa juga mengadakan pertemuan di Madrid dengan para pemimpin Amerika Latin dengan harapan mampu menutup perjanjian agresif selama masa kepresidenan Spanyol di Uni Eropa. Perjanjian ini tidak memberikan manfaat apa pun kepada para petani dan warga di kedua sisi Atlantik.

Uni Eropa berusaha memaksakan 4.500 ton susu bubuk dan 2.000 ton keju dengan harga rendah di pasar Amerika Tengah. Hal ini tentu saja melawan kepentingan produsen susu di wilayah ini.

Menteri Pertanian Kolombia Andres Fernandez juga mengakui bahwa perjanjian kontroversial antara Uni Eropa dan Kolombia akan merugikan lebih dari 400.000 masyarakat petani di Kolombia, khususnya para peternak sapi.

Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir ini, Komisi dan Dewan Eropa dan telah memutuskan untuk meningkatkan kuota susu di negara masing-masing dengan tujuan meningkatkan ekspor produk susu. Hal ini menyebabkan penurunan harga susu di Eropa serta bangkrutnya produsen kecil dan menengah.

"Kebijakan subsidi ekspor ini justru merangsang kebijakan yang absurd dan memaksakan impor di Eopa. Hal ini jelas merupakan ancaman bagi kedaulatan pangan dan sangat bertentangan dengan la Via Campesina dimana setiap petani anggota kami memberikan prioritas untuk memberi makan populasi dan masyarakatnya" ungkap Henry.

Henry menambahkan bahwa apabila hal ini tetap dijalankan penerima manfaatnya hanyalah perusahaan Industri transnasional yang terlibat dalam distribusi dan transformasi eksport tersebut, bukan petani Amerika Latin atau Uni Eropa.

Oleh karena itu, delegasi La Via Campesina di Madrid menegaskan kembali bahwa pertahanan dari para petani pertanian berkelanjutan adalah hal yang lumrah, baik iru Eropa dan Amerika Latin. Sedangkan berbagai perjanjian perdagangan bebas hanyalah menghancurkan kedaulatan pangan masyarakat.

" Untuk tujuan ini, kami menuntut agar negara-negara anggota Uni Eropa dan pemerintah yang berpartisipasi dalam KTT tidak menandatangani kesepakatan perdagangan bebas yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat mereka", tambah Henry.

**LA VIA CAMPESINA**

International Peasant Movement

*Agrarian Reform, Biodiversity and Genetic Resources, Food Sovereignty and Trade, Women, Human Rights, Migration and Rural Workers, Sustainable Peasant's Agriculture, Youth*

www.viacampesina.org

KEBIJAKAN AGRARIA

# Dokumen CFA milik PBB tidak aspiratif

DUBLIN. Satuan Tugas Tingkat Tinggi PBB pada krisis ketahanan pangan global mengadakan rapat konsultasi dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil di Dublin, untuk memperbarui dokumen "Kerangka Kerja Komprehensif untuk Aksi" (CFA) yang diproduksi pada bulan Juli 2008 yang lalu. (17-18/05)

Laporan ini mengumpulkan serangkaian tindakan jangka menengah dan panjang untuk memungkinkan pemerintah, PBB dan badan-badan multilateral Bretton Wood untuk memberikan dengan apa yang disebut Ban Ki Moon (Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa) sebagai jawaban yang koheren dan terkoordinasi untuk krisis pangan global. Dalam jangka pendek, akses pangan bagi penduduk yang paling rentan harus ditingkatkan dan dalam jangka panjang situasi rawan pangan yang baru harus dihindari.

Pada prinsipnya, inisiatif ini tampaknya memenuhi semua harapan, tetapi dalam prakteknya masih terdapat beberapa poin yang harus dikritik. CFA ditulis oleh beberapa individu dari Satuan Tugas Tingkat Tinggi dan pertama kali dirancang tanpa konsultasi dengan pemerintah maupun dengan masyarakat yang paling sering terkena dampak kenaikan tibatiba harga pangan (misalnya produsen kecil, masyarakat nelayan, miskin kota, baik laki-laki maupun perempuan). Dua tahun kemudian, operasi Dublin dan konsultasi tertulis sebelumnya adalah usaha untuk membuat ringan awal ini.

Konsultasi Ini terkesan tidak serius. Tujuannya tidak untuk menguraikan jawaban sesuai dengan harapan masyarakat sipil tetapi lebih untuk mendapatkan balasan komentar. Untuk penulis CFA ini, solusi kerawanan pangan adalah melalui pasar global, peningkatan produktivitas dan investasi di bidang pertanian dengan cara input industri dan teknologi, pengurangan hambatan tarif yang memungkinkan untuk sirkulasi barang yang lebih besar, kesimpulan cepat ke putaran Doha, serta pengembangan investasi swasta untuk memproduksi bahan bakar agro di negara-negara berkembang. Tujuannya hanya untuk mentransformasikan petani yang bertani secara konvensional menjadi pertanian industri secepat mungkin. Namun bagi banyak organisasi masyarakat sipil, jawaban-jawaban yang disebutkan tersebut adalah penyebab dari situasi krisis pangan yang dihadapi oleh banyak negara saat ini. Inilah sebabnya mengapa beberapa organisasi menolak untuk mengambil bagian dalam konsultasi CFA, karena mereka melihatnya hanya sebagai sebuah distorsi.

Henry Saragih, Koordinator Umum La Via Campesina mengatakan bahwa gaya konsultasi Dublin adalah upaya lain dari mereka yang ingin melemahkan proses reformasi FAO di Komite Keamanan Pangannya (CFS). Hal ini cukup Jelas, karena di belakang para penulis CFA adalah negara-negara donor G8, Bank Dunia, dan WTO.

"CAF yang disusun oleh Satuan Tugas Tingkat Tinggi adalah murni sebuah dokumen administrasif bukan deklarasi yang dinegosiasikan secara intens oleh pemerintah. Kerangka strategis yang dibuat oleh Komite FAO untuk Ketahanan Pangan harus membangun. Dalam pandangan kami, masukan lain yang sangat relevan untuk proses ini adalah Penilaian Internasional terhadapa Teknologi dan Sains Pertanian untuk Pembangunan, Panduan FAO "tentang Hak atas Pangan" dan dokumen "Kebijakan dan tindakan untuk memberantas kelaparan dan gizi buruk" tambah Henry. #

SEREMONI

## Diskusi Publik SPI: "Produksi dan Kebijakan Pertanian Padi serta Kesejahteraan Petani"

(Kiri-Kanan) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul Ir. Suharyono - Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia Achmad Ya'kub.

BANTUL. Serikat Petani Indonesia (SPI) mengadakan diskusi publik bersama pemerintah Kabupaten Bantul mengenai Produksi dan Kebijakan Pertanian Padi serta Kesejahteraan Petani(27/04). Kegiatan yang dipersiapkan oleh SPI DPW Yogjakarta ini berlangsung di Kantor Kabupaten Bantul dan dihadiri oleh para anggota SPI Wilayah Jogjakarta, jaringan LSM Pertanian daerah Bantul, penyuluh pertanian, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, Ir. Edi Suharyono, sebagai salah satu pembicara dalam diskusi publik ini menyampaikan bahwa beliau setuju dengan hasil kajian yang dilakukan SPI pada tahun 2009 lalu bahwa swasembada beras yang terjadi saat ini memang belum mensejahterakan petani. Beliau juga sependapat bahwa sistem harga dasar pembelian gabah atau padi saat ini seolah memberikan subsidi harga beras kepada publik. Menurut beliau kebijakan yang harus diterapkan ialah pemberian subsidi harga beras. Walaupun demikian usulan SPI yang menyatakan bahwa peningkatan produksi pangan nasional harus disertai dengan peningkatan luas lahan dianggap terlalu sulit, karena menurutnya peningkatan luas lahan baru sulit terwujud dan amat mahal untuk mencetak sawah-sawah baru. Padahal yang dimaksudkan SPI dalam hal ini adalah agar pemerintah segera mendistribusikan lahan-lahan terlantar, lahan-lahan eks HGU perkebunan kepada petani kecil dan petani tak bertanah.

Achmad Ya'kub, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan pentingnya kerjasama antara organisasi tani dengan pemerintah dalam membangun strategi mewujudkan kesejahteraan petani.

"Masalah pertanian merupakan masalah bangsa dimana pembangungan bangsa ini akan berhasil melalui pembangunan pertanian. Proses regenerasi bagi petani juga penting, hal ini jugalah yang mendasari langkah SPI untuk membangun sekolah lapang bagi para pemuda tani untuk belajar tekhnik pertanian organik, proses seperti ini juga bisa dan perlu dimasifkan di tingkat daerah" tambah Ya'kub.#

SEREMONI

## BPW SPI Sumut menggelar diskusi pembaruan agraria

MEDAN. Dalam rangka peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional yang jatuh pada 17 April yang lalu, Badan Pelaksana Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar diskusi dengan tema "Strategi Perjuangan Pembaruan Agraria" yang diadakan di Sekretariat SPI Sumut (30/05).

Tujuan dilaksanakannya diskusi ini selain untuk memperingati perjuangan petani internasional juga untuk mencari strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perjuangan pembaruan agraria mengingat tingginya konflik agraria yang ada di Sumatera Utara. Saat ini setidaknya ada sepuluh basis anggota SPI Sumut yang sedang berjuang untuk mempertahkan hak mereka atas tanah yang telah dirampas oleh pihak perkebunan baik perkebunan swasta maupun perkebunan milik Negara.

"Saya merupakan salah satu korban dari tindakan kriminalisasi terhadap petani" ujar Jumadi alias Ribut, Ketua SPI Basis Damak Maliho Kabupaten Deli Serdang. Laki-laki berusia 60 tahun ini pernah mengalami tindak kriminalisasi, dipenjarakan selama lima bulan sepuluh hari karena berjuang mempertahankan haknya atas tanah yang selama ini dikuasai oleh PTPN IV Kebun Adolina.

Lain lagi halnya dengan nasib yang dialami oleh petani anggota SPI Basis Simpang Kopas Kabupaten Asahan. Selama belasan tahun mereka berjuang untuk merebut kembali lahan yang telah dikuasai oleh PT Jaya Baru Pertama, namun sampai hari ini intimidasi dan teror sering mereka alami. "Seolah pemerintah menutup mata akan nasib kami sebagai petani. Pihak kepolisian yang seharusnya membela rakyat kecil malah lebih memilih berpihak kepada perusahaan" kata Amron, Ketua SPI Ranting Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan yang juga merupakan anggota SPI Basis Simpang Kopas.

"Petani akan semakin tergantung dengan perusahaan besar atau kita (petani-red) akan menjadi buruh di perusahaan itu, itulah yang disebut koorporatisasi" ungkap Henry Saragih Ketua Umum Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI yang merupakan salah satu pemateri dalam diskusi ini.

Wagimin, Ketua BPW SPI Sumut, dari awal diskusi ini berlangsung sangat mengharapkan akan ada satu formula baru dalam perjuangan pembaruan agrarian. "Perjuangan mewujudkan pembaruan agraria ini sudah lama kita lakukan namun sampai saat ini tidak banyak perubahan yang dapat dirasakan oleh petani, pemerintah justru banyak mengeluarkan peraturan yang tidak memihak kepada rakyat, jadi harapannya dengan diadakannya diskusi ini kita dapat membuat strategi baru di bidang pembaruan agraria" sebutnya pada saat membuka diskusi ini.

Diskusi yang digelar mulai pagi hingga sore hari ini akhirnya menghasilkan beberapa poin penting. Petani harus mempunyai kemampuan dalam memahami undang-undang yang sering digunakan sebagai dalih untuk mengkriminalisasi petani, petani harus lebih progresif dalam menanggapi isu-isu yang berkenaan dengan pembaruan agraria, dan yang lebih penting lagi petani harus bersatu dan merapatkan barisan dalam perjuangan untuk mewujudkan pembaruan agraria sejati.#

ALIANSI

## Peringatan Hari Buruh 2010, sebuah momentum untuk menyatukan gerakan rakyat

Ribuan massa buruh menggelar aksi memperingati hari buruh internasional (1 Mei) di Jakarta. Aksi ini dipusatkan di istana negara Republik Indonesia.

JAKARTA. Lebih dari 10.000 massa buruh dari Jakarta dan sekitarnya melakukan aksi memperingati Hari Buruh Internasional pada pagi hingga sore tadi (01/05). Aksi ini dipusatkan di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia hingga Istana Presiden RI.

Ali Fahmi, Ketua Departemen Penguatan, Pengawasan dan Konsolidasi Organisasi Nasional SPI mengatakan bahwa peringatan Hari Buruh Internasional ini dapat digunakan sebagai momen untuk menyatukan gerakan rakyat baik itu buruh, petani, nelayan, rakyat miskin kota, hingga mahasiswa. "Untuk ke depannya kita bisa lebih mengkonsolidasikan kekuatan gerakan rakyat sehingga nantinya kekuatan ini diharapkan memang benar-benar memiliki kekuatan politis yang bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang benar-benar pro rakyat kecil" ungkap Ali.

Sutrisno Sastromiharjo dari Serikat Buruh Indonesia (SBI) se-Jabodetabek mengungkapkan bahwa baik buruh dan petani harus bersatu membangun persatuan rakyat dan menjadi alat perjuangan politik bagi rakyat. Sutrisno menambahkan bahwa bahwa hal ini harus segera dilakukan karena kebijakan pemerintahan saat ini hanyalah berdasarkan kepentingan pemodal besar bukan kepentingan rakyat mayoritas. "Hanya persatuan rakyat yang berani melawan kerakusan kaum modal yang akan membangun kesejahteraan, kemakmuran, keadilan bagi rakyat mayoritas dan kemajuan peradaban yang bersandar pada kearifan lingkungan" kata Sutrisno.

Aksi memperingati Hari Buruh Internasional kali ini juga memiliki tuntutan umum yakni untuk menolak rencana revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Revisi UU ini sendiri sudah dimasukkan ke dalam program legislasi nasional DPR Tahun 2010 ini.

"Intinya UU ini akan direvisi sehingga nantinya akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan pemodal, seperti membebaskan sistem kerja *outsourcing*, menerapkan sistem kontrak pada semua jenis pekerjaan, dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang akan semakin memeras rakyat kecil" tambah Sutrisno.#

ALIANSI

## SPI lakukan aksi menolak privatisasi

Wahyu Agung Perdana (memegang megafon), staf departemen penguatan organisasi SPI sedang memberikan orasinya dalam aksi menolak privatisasi.

JAKARTA. Serikat Petani Indonesia (SPI) melakukan aksi menolak privatisasi di bundaran Hotel Indonesia siang tadi (04/05). Aksi ini dilakukan sebagai solidaritas untuk memperingati Hari Aksi se-Asia Melawan Privatisasi Pelayanan Umum dan Sumber Daya Alam.

Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan SPI menyebutkan bahwa berbagai perundangan yang muncul seperti Undang-Undang (UU) Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perkebunan, UU HAKI, menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup rakyat, karena barang publik yang seharusnya menjadi hak setiap warga Negara justru dimodifikasi untuk tujuan pencarian keuntungan sebesar-besarnya.

"Hal ini ditambah lagi dengan konsep pemerintah kita tentang *food estate* yang diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2010 tentang lahan telantar dan PP No 18/2010 tentang usaha budidaya tanaman, yang akan semakin memprivatisasi pertanian dan meminggirkan para petani kecil" ungkap Ruli.

Ruli juga menambahkan bahwa privatisasi ini didukung sepenuhnya oleh ADB (*Asian Development Bank*) melalui kucuran utangnya. Lebih dari empat dasawarsa ADB bersama-sama dengan Bank Dunia menjadi penggerak privatisasi barang dan layanan publik khususnya air dan listrik.

Privatisasi tersebut juga telah menggiring peningkatan biaya yang ditanggung oleh rakyat secara berkelanjutan dan eskalatif.

"Oleh karena itu melalui aksi ini kami menghimbau dan mendesak Pemerintah agar segera menghentikan keterlibatan aktor non-negara dalam kepemilikan dan pelayanan kebutuhan hak dasar rakyat yang melahirkan privatisasi dan state corporatism" tambah Ruli.

Selain SPI, aksi ini juga diikuti oleh aliansi SPI yang berasal dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA), Debtwatch, dan Lingkar Studi-Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI).#

PEJUANG TANI

# Sukardi Bendang: "Bacalah, dan kita akan cerdas"

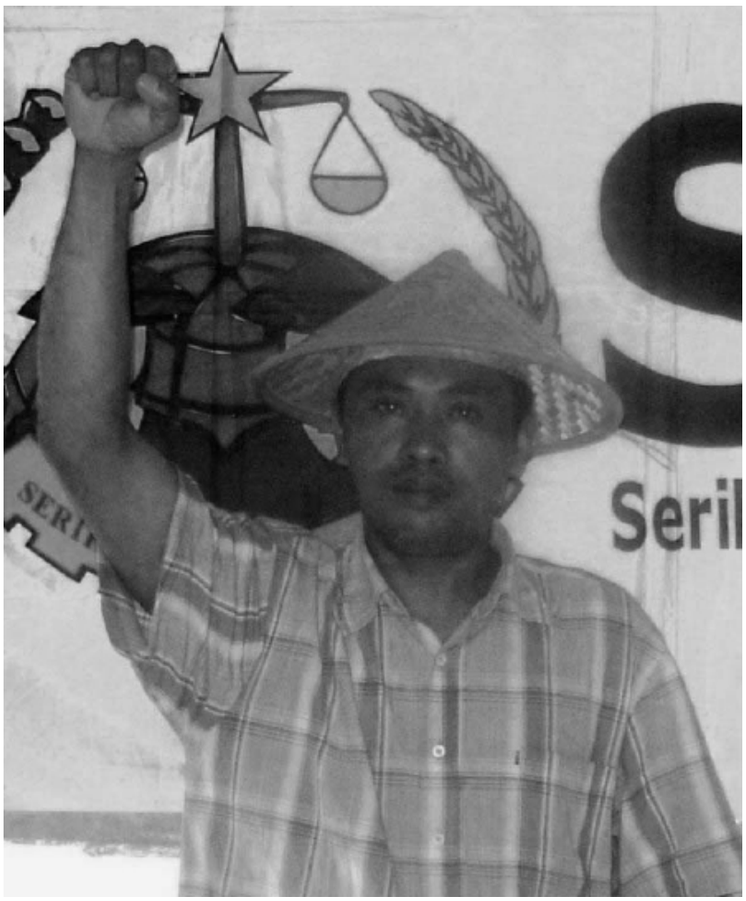

Sukardi Bendang, Ketua BPW SPI Sumatera Barat yang gemar membaca

Buku adalah jendela dunia. Setidaknya ungkapan itulah yang selalu dipegang oleh Sukardi Bendang, Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat. Pria yang akrab dipanggil "Cak Kardi" ini lahir di Tanjung Pati pada 24 September 1970 lalu. Ketertarikan pria ini terhadap buku dipicu oleh ibunya yang juga cukup gemar membaca. Ibu Sukardi suka meminjam buku dari taman bacaan untuk kemudian dibaca oleh anak-anaknya.

"Buku yang hingga saat ini sangat berkesan bagi saya adalah buku tentang seorang perempuan yang gigih berjuang membela pemikiran dan masyarakatnya, sayangnya saya lupa judulnya" kata Sukardi.

Namun kegemaran membaca buku Sukardi justru semakin meresahkan ibunya. Pria yang memiliki tiga orang saudara laki-laki ini pun kemudian menceritakan masa dimana ibunya membakar semua buku miliknya. Sukardi menuturkan bahwa pada waktu itu dia sedang duduk di bangku SMA. Suatu hari ketika dia pulang dari sekolah, Sukardi cukup terkejut ketika setibanya di rumah ternyata sang ibu telah membakar buku-buku koleksinya. Hal ini cukup kontras mengingat ibunyalah yang menjadi motor pendorong bagi Sukardi untuk terus membaca dan membaca.

"Zaman orde baru yang mengharamkan bacaan-bacaan tentang pergerakanlah yang mengakibatkan itu semua, ibu takut saya menjadi yang tidak-tidak, padahal setelah reformasi pada 98 yang lalu, buku-buku yang dibakar ibu saya itu justru menjadi buku yang wajib dibaca oleh setiap orang yang ingin mendalami bidang politik " ungkap Sukardi.

Selepas SMA sekitar tahun 1989, Sukardi ingin melanjutkannya ke perguruan tinggi. Namun karena faktor biaya, Sukardi terpaksa mengurungkan niatnya. Pria yang cukup hobi membaca buku tentang sejarah ini juga hampir saja bergabung ke dalam kesatuan polisi. Adalah pamannya yang begitu ingin agar Sukardi menjadi aparat polisi yang siap membela rakyat, namun suami dari Yuliatati ini justru punya keinginan yang berbeda. Sukardi mencoba mengikuti khittah asli masyarakat Minang yang lihai dalam berdagang, walaupun kedua orang tuanya adalah perantau yang berasal dari Jawa. Sukardi pun memutuskan untuk berjualan cabai dari pasar ke pasar.

Selama kurang lebih setahun berdagang, Putra dari Marsinah dan Rahman ini masih belum menemukan jiwanya dari berdagang. Dia merasa jenuh. Sukardi kemudian merasa mendapatkan ilham untuk mengolah lahan milik orang tuanya. Kedua orang tua Sukardi adalah petani tulen yang dalam kesehariannya menanam padi dan sayuran. Sukardi bersaudara juga tumbuh dari hasil lahan pertanian orang tuanya tersebut.

Sukardi juga pernah bekerja di perusahaan sawit swasta di daerahnya, di Kabupaten Payakumbuh. Dia bertanggung jawab tehadap urusan teknis pembangunan.

"Saya hanya sebentar kerja disitu, saya keluar karena miris melihat ketidakadilan dan kesewenangan disana, perusahaan membakar kebun karet milik masyarakat yang tidak mau digusur dan diganti rugi pada malam hari. Ini sangat bertentangan dengan hati nurani saya" ungkap Sukardi dengan tegas.

**Organisasi**

Pada sekitar tahun 1995 terjadi pemindahan dam PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Koto Panjang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Proses pemindahan dam ini justru banyak membawa kerugian pada masyarakat sekitar. Sukardi cukup geram melihat ketidakadilan di daerah itu, misalnya proses ganti rugi dan pembebasan lahan yang sama sekali merugikan rakyat kecil. Dengan rasa empati yang cukup tinggi, Sukardi pun ikut berkumpul dengan pemuda-pemuda yang berasal dari daerah sekitar.

Dari sinilah Sukardi mulai mengenal Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB) yang tergabung dalam Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI-saat ini SPI). Pada Tahun 2002-2007, Sukardi dipercaya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Petani, wilayah Payakumbuh di SPSB, dan hingga kini menjadi ketua BPW SPI Sumbar.

Kiprah Sukardi di dunia organisasi massa perjuangan ini juga didukung oleh istri dan ibunya. "Orang tua saya pernah mengatakan bahwa apabila saya ingin serius membangun organisasi perjuangan petani (baca:SPI) saya terlebih dahulu harus berdiskusi dengan istri dan menyiapkan ekonomi keluarga, kalau tidak akan bermasalah di kemudian hari" ungkapnya.

Di antara waktunya yang padat untuk mengurus organisasi sekaligus bertani, Sukardi masih menyempatkan untuk membaca buku ataupun dokumen-dokumen internal organisasi.

"Dengan membaca kita akan menjadi jauh lebih cerdas, pengetahuan kita pun akan semakin luas, perkembangan media komunikasi seperti internet seharusnya bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan pengetahuan kita" ungkap pria yang saat ini memiliki sawah sekitar satu hektar.#

ANALISIS

# Upaya Menanggulangi Krisis Pangan

Seorang petani sedang memanen kangkung hasil pertanian organik. Pertanian berkelanjutan berbasis keluarga adalah salah satu cara mengatasi krisis pangan.

YOGYAKARTA. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia di mana pun berada. Meski pangan dapat diperbaharui dan diproduksi kembali pangan selalu menjadi perebutan. Perebutan pangan menjadi menjadi pangan semakin melambungkan harganya.

Gejala krisis pangan 2008 semakin menguat. Krisis global yang terjadi bukan karena harga minyak bumi yang meroket di atas 100 dollar AS per barrel, melainkan keterbatasaan stok pangan. Krisis pangan akan menjadi krisis global terbesar abad ke-21. Krisis pangan diperkirakan akan menimpa tiga puluh enam negara, termasuk Indonesia. Persediaan pangan yang terbatas, harga komoditas pangan tahun ini akan menembus level yang kritis.

Harga jagung akan mencapai rekor tertinggi sebelas tahun terakhir dan kedelai dalam tiga puluh tahun terakhir, serta gandum sepanjang sejarah. Persediaan beras akan mencapai titik nadir yang mendorong harga mencapai level tertinggi selama dua puluh tahun terakhir. Gandum mencapai titik terendah selama lima puluh tahun terakhir. Harga seluruh pangan meningkat pada angka fantastis tujuh puluh lima persen dibandingkan pada tahun 2000, beberapa komoditas bahkan lebih dari dua ratus persen.

**(SPI) Sumatera Utara**

Harga pangan yang melambung memicu protes dan kerusuhan yang tinggi terjadi diberbagai sudut dunia. Oktober 2007, terjadi demonstrasi besar-besaran di Bengali Barat, India, disusul di Senegal, Mauritania, Meksiko dan Yunani. Januari 2008, di Kamerun rusuh besar yang memakan korban jiwa dua puluh orang. Hal sama juga terjadi di Burkina Faso, Afrika Barat. Demontrasi dengan ukuran yang lebih kecil terjadi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Inggris, dan Skotlandia.

Dalam setiap krisis petani negara berkembang selalu kalah. Situasi krisis ini dimanfaatkan oleh petani negara maju, inverstor, pemain bursa saham, dan pengusaha multinasional. Petani negara berkembnag atau negara ketiga hampir mustahil memenangkan situasi krisis pangan ini. Lonjakan harga pangan tidak menguntungkan petani, karena petani memiliki lahan pertanian kurang dari 0,24 hektar. Rata-rata nasional 0,36 hektar dengan jumlah petani 48% total penduduk. Proporsi yang besar adalah buruh tani tidak berlahan. Kelompok petani berlahan sempit dan buruh tani justru menderita, karena sekitar 60% pendapatan dibelanjakan untuk pangan.

Kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, dan busung lapar menjadi fenomena yang biasa terjadi di negeri ini. Negeri kita yang melimpah sumber daya alam tidak mampu menyejahterakan kaum petani. Pemerintah bermitra dengan pengusaha besar dan mengimpor benih, yang menjadikan kaum petani semakin menderita. Krisis pangan bermuara pada situasi "tidak berdaulat atas pangan". Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa dan masyarakat untuk menetapkan pangan pada dirinya sendiri. Mereka berhak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan menjadikan sebagai subyek dalam kekuatan pasar.

Organisasi tani internasional La Via Campesina mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak seluruh rakyat, bangsa dan negaranya untuk menentukan kebijakan petanian dan pangannya sendiri tanpa campur tangan negeri lain. Ada beberapa prinsip tentang kadaulatan pangan (La Via Campesina), diantaranya adalah; 1) hak akses ke pangan, 2) reformasi agraria, 3) penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, 4) pangan untuk pangan dan tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan, 5) pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi, 6) melarang penggunaan pangan sebagai senjata, 7) pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Konsep kedaulatan pangan telah berkembang sedemikian rupa melampaui konsep ketahanan pangan (food security) yang lebih dikenal sebelumnya, yang hanya bertujuan untuk memastikan diproduksinya pangan dalam jumlah yang cukup dengan tidak memperdulikan macamnya, bagaimana, di mana dan seberapa besar skala produksi pangan tersebut. Kedaulatan pangan adalah interpretasi luas dari hak atas pangan, ia melampaui wacana tentang hak pada umumnya.

Rumusan kedaulatan pangan itu dikembangkan oleh kelompok-kelompok akar rumput sehingga jarang menjadi wacana ilmiah di kalangan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Konsep kedaulatan pangan ini berseberangan dengan konsep semacam WTO, Bank Dunia, dan IMF. Hal ini mengakibatkan prinsip kedaulatan pangan jarang menjadi kebijakan pertanian di Indonesia.

Krisis pangan berarti tantangan dan kesempatan untuk memperbaiki masa depan kehidupan petani Indonesia. Diversifikasi pangan, penghargaan terhadap pangan lokal, perlindungan petani, konservasi keanekaragaman hayati pertanian, pertanian berkelanjutan, dan reformasi agraria hanya menjadi sesuatu yang enak untuk didengar tetapi tidak pernah untuk dilaksanakan. Jepang baru-baru ini mengeluarkan program mengganti tepung gandum dengan tepung umbi sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kedaulatan pangan.

Pemerintah Indonesia hanya melakukan gerakan sporadis dan sarana kepentingan politis. Perubahan dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan harus dimulai untuk menyelamatkan pangan dan petani. Terakhir yang sangat penting adalah kaum petani harus tahu anggaran untuk pos pertanian, dan pemerintah harus memberi akses informasi anggaran pertanian kepada kaum petani.#

**Rumawi, Serikat Petani Indonesia (SPI) Yogyakarta**

ANALISIS

# Permaculture: sistem alternatif pembangunan diklat SPI Basis Talang Keramat, sebagai solusi perubahan iklim

Anggota SPI Basis Talang Keramat yang sedang menyiapkan diklat *permaculture*

*Permaculture* adalah sistem desain yang bekerja ke arah integrasi yang harmonis dari lingkungan dan masyarakatnya untuk menyediakan pangan, tempat berlindung, energi dan kebutuhan lain secara berkelanjutan. Hal ini mensinergiskan produksi pangan, struktur, teknologi, energi, sumber daya alam, lanskap, sistem hewan dan tanaman, serta struktur sosial dan ekonomi. Sistem ini sendiri dapat diterapkan pada kondisi perkotaan dan pedesaan dan dalam skala desain apapun.

10 prinsip dasar *Permaculture*:

1. Prinsip keragaman – Bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai jenis pangan, tanaman, dan binatang yang menguntungkan ke dalam sebuah desain. Hal Ini memunculkan sebuah sistem polikultur interaktif yang stabil, yang menyediakan kebutuhan manusia dan juga kebutuhan spesies lainnya.

2. Prinsip pengaruh tepian – Secara umum, ada lebih banyak energi dan keragaman hayati di tepian di mana dua jenis sistem alam tumpang tindih. Di batas ini kita dapat mengakses sumber daya dari kedua belah pihak. Menggunakan efek tepian, dan pola-pola alami lain yang menciptakan efek terbaik.

3. Prinsip Perencanaan Energi – Menempatkan elemen desain anda sedemikian rupa untuk meminimalkan penggunaan energi (termasuk bahan bakar fosil & tenaga manusia). Memanfaatkan energi dan sumber daya yang anda miliki, yang dimulai dari dalam sistem kemudian dari luar sistem dengan seefektif mungkin. Sumber daya energi dari dalam meliputi kekuatan alam seperti gravitasi, tenaga angin, dan tenaga air. Hal ini menghemat waktu, tenaga dan uang.

4. Prinsip energi daur ulang – Dalam sistem alam tidak ada yang tersia-siakan. Output dari satu proses alam dapat menjadi sumber daya lain. Daur ulang dan gunakan kembali semua sumber daya sebanyak mungkin.

5. Prinsip skala – Menciptakan sistem " skala manusia ". Pilihlah teknologi yang tepat dan sederhana untuk digunakan dalam desain. Hanya dengan menciptakan sistem yang teraturlah yang dapat memulai sebuah langkah kecil dengan rdampak besar untuk mencapai tujuan yang idelal.

6. Prinsip sumber daya hayati – Gunakanlah metode dan proses yang alamiah untuk menyelesaikan tugas-tugas. Temukanlah hal-hal di alam (tanaman, hewan, mikroba) yang mendukung sistem desain dan minimalkan masukan energi dari luar.

7. Prinsip multi elemen – Dukunglah setiap kebutuhan dan fungsi yang penting dengan menggunakan lebih dari satu cara, sehingga kegagalan sementara dalam sebuah elemen tidak akan menghentikan fungsi yang lain. Hal ini juga dilaksakan dengan menyadari bahwa hampir selalu ada lebih dari satu cara untuk mencapai tugas apapun.

8. Prinsip multi fungsi – Banyak hal yang dapat digunakan dengan berbagai cara dan untuk berbagai fungsi. Satu aturan dasar di permaculture adalah untuk mencoba merancang tiga kegunaan dengan hanya menggunakan setiap elemen dari sebuah sistem. Hal ini dapat menghemat ruang, waktu dan komplikasi dalam setiap proyek.

9. Prinsip suksesi alam – Bekerjalah dengan alam dan melalui proses-proses dari sistem alamiah. Apabila diperlukan dapat juga dilakukan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan melalui riset dan observasi.

10. Prinsip lokasi relatif – Tempatkan setiap elemen desain anda saling berhubungan dengan elemen lainnya sehingga dapat menguntungkan satu sama lain, misalnya simpanlah alat-alat di dekat mereka akan digunakan.

**J.J. Polong, Majelis Nasional Petani (MNP), Serikat Petani Indonesia (SPI)**

TANAH UNTUK PETANI !!!
www.spi.or.id

ANALISIS

# Food estate, untuk siapa?

Seorang petani sedang memanen kedelai di lahannya. Eksistensi lahan milik petani kecil akan semakin berkurang apabila *food estate* diterapkan di Indonesia

MEDAN. Masyarakat asli Papua memiliki kearifan lokal yang unik dalam analogi pola interaksi kehidupan mereka dan alam. Mereka tidak hanya memiliki dimensi ekonomi saja sebagai penunjang kehidupan, akan tetapi lebih dari itu memiliki makna religius dan sosial yang sangat berpengaruh pada eksistensi mereka. Masyarakat Papua mengidentikkan langit dengan sosok ayah yang superior yang menurunkan embun dan hujan. Menjelajah ke segala arah untuk mencari kehidupan dan memberi rasa aman. Tanah dimaknai sebagai ibu yang memberikan kesuburan dan nutrisi. Hutan adalah wujud dari yang Maha Kuasa.

Hal ini lah yang menyebabkan peran dan keberadaan hutan bagi masyarakat Papua tidak dapat digantikan dengan uang. Namun kearifan lokal itu sedang terkikis dan akan mendapat tantangan frontal dari perkembangan politik ekonomi yang semakin mengarah kepada liberalisasi di segala sektor. Ketika arus modal masuk dan Papua dilihat potensial untuk mengembangkan perkebunan dan pertambangan, kekayaan kultur tadi kerap ditundukkan dan dikalahkan oleh kepentingan kapital.

Adalah konsep *food estate* yang menjadi momok bagi pertanian tradisional yang bukan hanya menjadi lahan penghidupan namun juga merupakan tradisi budaya (*agriculture*) yang memiliki keunikan tersendiri di setiap daerah. Dengan dalih untuk mencapai kecukupan pangan dalam negeri dan ekspor, tahun 2010 ini pemerintah akan melakukan pengembangan lahan pertanian pangan dalam skala besar atau dalam bahasa internasionalnya *food estate.*

## Merauke, target utama pengembangan *food estate*

Salah satu yang menjadi target utama pemerintah mengembangkan *food estate* adalah Kabupaten Merauke, Papua. Sejak beberapa tahun terakhir, kabupaten yang kini dinahkodai Bupati Johanes Gluba Gebze sudah mencanangkan program MIFE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*). Berdasarkan keterangan dari Menteri Pertanian Suswono, pemerintah pusat berniat memanfaatkan lahan datar di Merauke sebagai sumber pembangunan pertanian untuk mencapai sasaran kecukupan pangan dalam negri dan ekspor. Sekitar 500.000 Ha lahan pertanian yang ada di Merauke direncanakan akan dijadikan sebagai tempat untuk pengembangan lahan pertanian pangan dalam skala besar.

Merauke memiliki cadangan lahan pertanian mencapai 2,49 juta hektare, terdiri dari luas lahan basah sekitar 1,937 juta Ha dan lahan kering 554,5 ribu Ha. Bahkan, lahan yang ada hampir semua datar sehingga cocok untuk usaha agribisnis skala komersial. Potensi raksasa itu jelas cukup menggiurkan calon investor. Dalam konsep MIFE ini, nantinya dilakukan penataan manajemen lahan dalam satu usaha pertanian yang terintegrasi. Minimal satu hamparan lahan seluas 1.000 ha yang terdiri 70% usaha tanaman pangan, 9% usaha ternak, 8% perikanan darat, 8% usaha perkebunan dan 5% untuk penggunaan lainnya.

*Food Estate* atau kita sebut saja Perkampungan Industri Pangan merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas. Hasil dari pengembangan *food estate* bisa menjadi pasokan ketahanan pangan nasional dan jika berlebih bisa dilakukan ekspor. Dan karena skala pertanian ini sangat besar dan luas, maka pengelolaannya juga dilakukan oleh perusahaan industri. Tentu proyek ambisius *food estate* ini menarik banyak investor perusahaan-perusahaan industri pangan nasional maupun konglomerasi internasional. Sedikitnya terdapat enam swasta nasional yang sudah siap mengucurkan uangnya untuk menggarap agribisnis di MIFE. Mereka adalah Bangun Tjipta, Medco Grup, Comexindo Internasional, Digul Agro Lestari, Buana Agro Tama, dan Wolo Agro Makmur.

Pemerintah telah membuat sejumlah payung hukum bagi konsep *food estate* ini sehingga investasi swasta, termasuk asing, bakal tersedot ke dalam negeri. Penerbitan Instruksi Presiden No 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, termasuk di dalamnya mengatur investasi pangan skala luas (*food estate*). Bahkan saat ini kementrian pertanian masih menunggu dikeluarkannya PP tentang pemanfaatan tanah terlantar.

Setiap perusahaan bisa mendapatkan izin untuk mengelola lahan maksimal 10 ribu hektare, kecuali untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Izin pengelolaan diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan bisa diperpanjang lagi untuk 35 tahun lalu 25 tahun. Adapun pembagian lahan untuk proyek di Merauke, 1 juta hektare lahan akan dialokasikan untuk penanaman tanaman pangan, 100 ribu hektare dialokasikan untuk peternakan, 100 ribu hektare untuk perikanan, dan sisanya untuk perkebunan.

Area yang tersedia dibagi dalam 10 cluster sentra produksi pertanian dan empat cluster prioritas, yaitu *cluster Greater* Merauke (padi sawah dan gogo serta jagung), Salor (padi, tebu, jagung, sapi, kacang tanah, dan kacang kedelai), Kartini (jagung, kacang tanah, kedelai, dan buah-buahan), serta Muting (Kacang tanah, sawit, dan buah-buahan).

Dari sini dapat dilihat bahwa konsep *food estate* ini akan membuka keran sebesar-besarnya bagi para pemodal

Sambungan dari hal. 14 ***Food Estate...***

untuk dapat menguasai lahan pertanian bahkan dapat dikatakan konsep *food estate* ini merupakan *land grabbing* (perampasan tanah-red) pertanian oleh pihak swasta yang dilegalkan pemerintah. Akibatnya, kepemilikan lahan milik petani rakyat berkurang secara signifikan, kehidupan petani akan memburuk karena tergusur korporat, dan petani akan menjadi buruh di tanahnya sendiri.

Pengembangan konsep *food estate* ini membahayakan karena swasta asing bisa menguasai pertanian dari hulu sampai hilir. Sektor yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ini tidak seharusnya dilepas pada mekanisme pasar, karena dapat mengganggu cita-cita kedaulatan pangan akibat kemungkinan terjadinya monopoli dan harga yang tak dapat dikendalikan.

Bagi kalangan investor besar, pengembangan *food estate* bisa memberikan jawaban. Tapi bagi peningkatan kesejahteraan petani yang berlahan sempit, *food estate* belum mampu menjawab persoalan malah makin memperparah keterpurukan petani setelah kebijakan-kebijakan berbau neoliberal yang diterapkan pemerintahan ini. Pengembangan food estate justru bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya ekonomi kaum tani.

Pembukaan lahan secara besar-besaran yang akan dilakukan oleh para investor dalam program *food estate* pasti menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat adat di Kabupaten Merauke. Pasalnya, dalam hal ini pihak adat tidak pernah diajak berembuk bersama dengan pemerintah maupun investor. Sehingga masyarakat adat dirugikan dengan keadaan tersebut. Warga Papua akan menjadi penonton dan akan semakin jauh terpinggirkan. Dan program ini menurut Moyuend wakil ketua I LMA (Lembaga Masyarakat Adat) Papua kurang pas karena pemerintah membuat suatu loncatan dari masyarakat yang saat ini masih peramu (meramu sendiri makanannya) ke arah yang lebih tinggi. Masyarakat tradisional Papua yang minoritas akan terpinggirkan jika pengelolaan tanah beralih ke sistem modern dan dengan dibukanya kesempatan yang luas untuk pendatang masuk ke merauke.

Pemerintah dapat belajar dari penerapan program perkebunan inti rakyat (PIR) di Papua pada awal tahun 1980-an, dampak sosial yang ditimbulkan sangat tinggi. Masyarakat asli Papua dihadapkan pada peralihan pola hidup, dari meramu menjadi pola industri yang berbasis perkebunan rakyat yang sebenarnya asing bagi mereka. Hutan kayu dan sagu yang sebelumnya menjadi basis hidup mereka tiba-tiba lenyap dan berganti menjadi kebun kelapa sawit. Reproduksi pangan seperti umbi-umbian dan sayur mayur mulai sulit dilakukan, binatang buruan sulit didapatkan.

Program *food estate* yang dicanangkan ini semakin membuat masyarakat asli Papua terpinggirkan. Karena harus diakui dalam dimensi investasi, penguatan sosial masyarakat kerap diabaikan. Yang menjadi fokus utama adalah pertumbuhan investasi dan laju modal. Gagasan dan rasa memiliki masyarakat asli Papua perlu diperhatikan karena mereka melihat tanah bukan semata-mata sebagai modal usaha. Lebih dari itu, tanah adalah bagian eksistensial dari budaya dan keberadaan mereka.

Berikut adalah kemungkinan kerugian implikasi *food estate*:

Potensi lahan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia tidak bisa maksimal dimiliki dan dikelola secar penuh oleh petani Indonesia. Apalagi jika mengacu kepada Undang-undang No 25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dengan berbagai turunannya yang memberikan peluang bagi investor untuk semakin menguasai sumber-sumber agraria, Peraturan Presiden No 77/2007 tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka disebutkan bahwa asing boleh memiliki modal maksimal 95 persen dalam budi daya padi. Peraturan ini jelas akan sangat merugikan 13 juta petani padi yang selama ini menjadi produsen pangan utama. Apalagi 77 persen dari jumlah petani padi yang ada tersebut masih merupakan petani gurem.

Jika perpres atau peraturan lain yang dihasilkan pemerintah tentang *food estate* ini lebih berpihak kepada pemodal daripada petani maka kemungkinan konflik seperti konflik di perkebunan besar yang ada selama ini akan terjadi juga di *food estate*. Bisa jadi akan muncul "tuan takur" baru yang menguasai lahan begitu luas dan menjadi penguasa setempat.

Jika peraturan yang lahir nanti memberikan kemudahan dan keluasan bagi perusahaan atau personal pemilik modal untuk mengelola food estate maka karakter pertanian dan pangan Indonesia makin bergeser dari *peasant based and family based agriculture* menjadi *corporate based food* dan *agriculture production*. Kondisi ini justru melemahkan kedaulatan pangan Indonesia.

Jika pemerintah tidak mampu mengontrol distribusi produksi hasi dari *food estate* maka para pemodal akan menjadi penentu harga pasar karena penentu dijual di dalam negeri atau ekspor adalah harga yang menguntungkan bagi pemodal.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyesalkan langkah yang diambil pemerintah untuk mendongkrak produksi padi nasional melalui program *food estate*. Pengembangan *food estate* justru bertentangan dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi kerakyatan, khususnya ekonomi kaum tani. Menurutnya, dengan adanya pembukaan *food estate*, maka karakter pertanian dan pangan Indonesia makin bergeser dari *peasant-based* and *family-based agriculture* menjadi *corporate-based food* dan *agriculture production*. Kondisi ini justru melemahkan kedaulatan pangan Indonesia.

Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan persoalan kesejahteraan petani ketimbang mengundang investor besar membangun *food estate*. Sebab, problem petani berlahan sempit dan kesejahteraan petani hingga kini belum mampu diselesaikan pemerintah. Setidaknya, kini ada 9,55 juta kepala keluarga (KK) petani yang kepemilikan lahannya di bawah 0,5 ha. Karena tidak mungkin petani yang mempunyai lahan sempit bisa sejahtera.#

**Fuad Perdana Ginting,**
**Pengurus Badan Pelaksana Wilayah (BPW)**
**Serikat Petani Indonesia**

EKONOMI

# SPI Basis Talang Keramat kembangkan unit usaha produksi opak

Para petani perempuan SPI Basis Talang Keramat sedang mengikuti pelatihan pembuatan opak untuk pengembangan unit usaha di Basis SPI tersebut.

BANYUASIN. Puluhan petani perempuan Serikat Petani Indonesia (SPI) saat ini sedang mengembangkan potensi lokalnya untuk membuka unit usaha. Ibu Basori, seorang anggota petani perempuan SPI menyebutkan bahwa mereka sedang mengikuti pelatihan pembuatan opak yang berbahan dasar singkong atau ubi kayu di desa Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (08/05).

"Dengan mengikuti pelatihan ini kami berharap akan lebih menguasai teknik-teknik pembuatan dan pemasaran opak, soalnya pasar opak di Sumatera Selatan ini cukup besar", ungkap Ibu Basori.

Ibu Basori menambahkan bahwa selama ini ubi kayu hasil tanaman petani lebih sering dijual begitu saja di pasar, dengan pengetahuan membuat opak ubi kayu dapat diolah terlebih dahulu sebelum dijual.

Pada kesempatan yang sama, J.J. Polong anggota Majelis Petani Nasional (MNP) SPI mengatakan bahwa unit usaha di tingkat basis ini dapat dikembangkan dalam sebuah koperasi.

"Setelah produksi berjalan baik manajemennya juga harus diperhatikan. Bisa saja dikerjakan secara kelompok atau dikerjakan perorangan di rumah masing-masing sebagai usaha sampingan ibu-ibu dan pemasarannya baru dikelola secara bersama", ungkap Polong

J. J. Polong menambahkan bahwa nantinya unit usaha yang lain mungkin juga akan dikembangkan di basis-basis SPI lainnya dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, seperti halnya ubi kayu di Talang Keramat.

"Potensi dan kearifan lokal setiap basis bisa lebih dikembangkan untuk membentuk unit-unit usaha kaum tani yang dapat menopang perekonomian setiap anggotanya" tambah Polong.#

PENDIDIKAN

# BPW SPI Sumut menggelar pelatihan administrasi dan dokumentasi

Zainal Arifin Fuad, Sekretaris umum BPP SPI sedang menyampaikan materinya dalam pelatihan administrasi dan dokumentasi di DPW SPI Sumatera Utara

MEDAN. Sebagai sebuah organisasi massa, sudah saatnya Serikat Petani Indonesia (SPI) merapikan sistem administrasi dan dokumentasi setiap kegiatan sehingga akan menjadi akan menghasilkan manajemen organisasi yang tertata dengan rapi. Mengingat akan pentingnya administrasi dan dokumentasi, Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumut menggelar pelatihan administrasi dan dokumentasi (02/05) di kantor sekretariat Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) SPI Sumut.

Pendidikan yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta dari ini dirasakan cukup bermanfaat mengingat selama ini para anggota SPI Sumut sering mengalami kebingungan ketika dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan administrasi organisasi seperti surat menyurat, kelengkapan atribut organisasi dan sebagainya.

Zainal Arifin Fuad selaku sekretaris Badan Pelaksana Pusat (BPP) SPI selaku pemateri menjelaskan pentingnya manajemen dan penataan sistem administrasi yang baik agar kerja-kerja organisasi dapat berjalan dengan lancar dan baik

"Kita ini sekarang berjuang melawan perusahaan-perusahaan yang memiliki sistem manajemen yang baik sehingga kita juga harus memiliki sistem manajemen yang tertata dengan baik juga. Walaupun kita melakukan perjuangan mengatasnamakan nilai-nilai kebenaran dan kerakyatan kalau manajemen kita buruk maka sia-sia lah perjuangan yang kita lakukan" ungkapnya.

Banyak muncul pertanyaan seputar administrasi organisasi yang tak jarang menimbulkan perdebatan namun hal ini semua merupakan proses pelajaran kita untuk menuju organisasi yang kuat baik buat secara pengorganisasian maupun kuat dari segi manajemen organisasinya.#

Apa itu *food estate*?, Bagaimana kemajuan Hak Asasi Petani di Indonesia?, Apa saja dosa-dosa kaum neolib?, Bagaimana penerapan pertanian berkelanjutan yang ideal? temukan jawabannya di: www.spi.or.id